

## **PEMAHAMAN SISWA SMA SWASTA DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA SURABAYA TENTANG DEMOKRASI**

**Jarot Dwi Asmoro**

084254032 (PPKn, FIS, UNESA) [dj\\_jarot@yahoo.com](mailto:dj_jarot@yahoo.com)

### **Abstrak**

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada saat ini pelajar maupun mahasiswa mempraktikkan demokrasi masih banyak yang merusak berbagai fasilitas umum. Ini membuktikan masih banyak masyarakat terutama pada kalangan pelajar tingkat SMA yang belum mengerti benar mengenai demokrasi. Oleh karena itu pada penelitian ini, akan diungkap bagaimana pemahaman siswa tentang demokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa angket. Analisis data dilakukan dengan statistik angka dan kemudian dideskripsikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman siswa SMA swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya tentang demokrasi sangat rendah (6,5%). Atau bisa dikatakan pemahaman siswa tentang demokrasi sebatas definisi, asal usul kata, dan arti kata sampai pada pemilu. Masih banyak siswa yang tidak tahu lebih lanjut dan mendalam tentang demokrasi seperti adanya supremasi hukum.

**Kata Kunci:** Pemahaman Demokrasi,

### **Abstract**

The facts in the field showed that at the moment the student or student implementing democracy still many damaging public facilities. This proves there are still many people especially at the high school level students who don't understand right about democracy. Therefore this study will describe what students' understanding of democracy. This is a quantitative descriptive research. Data collection techniques that are used in the form of questionnaires. Data analysis was done with numbers and statistics and then descriptive.

The result showed that the high school students understanding of private and madrasah aliyah Surabaya country about democracy can be said that the understanding of students of high school and madrasah aliyah Surabaya country about democracy is very low. The understanding of students of private and religious schools overseas about democracy only 6,5%. Or it could be said that the student understood the extent of democracy in the definition, the origin of the word, and the meaning of the word up on elections. Many students do not have further insight and depth knowledge about democracy as the rule of law.

**Keywords:** Understanding Democracy .

**UNESA**  
**Universitas Negeri Surabaya**

## I. PENDAHULUAN

Pada awal sejarahnya demokrasi hanya dimengerti lewat model partisipasi politik langsung yang melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam suatu proses politik, proses politik merupakan penataan kehidupan bersama yang dikelola secara bersama. Akhirnya oleh Aristoteles dinamakan sebagai bentuk negara *ideal politica*, atau yang secara modern disebut oleh Robert A. Dahl sebagai *Polyarchy*, yang sebagai gantinya dari istilah ini kemudian lebih populer dengan sebutan demokrasi. Jadi dari sejarahnya demokrasi mempunyai ciri utama yakni adanya pengelolaan bersama oleh seluruh warga polis (negara kota/*city state*) yang jumlah penduduknya relatif kecil. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejarah bahwa demokrasi mulai dicetuskan sebagai bentuk politik partisipatoris yang melibatkan seluruh warga kota kecil di Yunani kuno, dimana hampir seluruh warga polis mempunyai keterlibatan dalam proses penataan negara ini belum melahirkan suasana kebebasan dan kesamaan yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Yunani purba pada waktu itu.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (*konstituen*) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti

diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung. Presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat, walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi, hal ini bisa terjadi akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, yakni sebagai tokoh impian ratu adil, bukan pada sistem pemerintahan yang bagus. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek dari pada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Sejarah demokrasi juga tidak dapat dilepaskan dari masalah pembahasan mengenai bentuk pemerintahan negara (*form of government*). Peninjauan masalah bentuk negara merupakan pembahasan mengenai, dalam bentuk apa organisasi negara itu menjelma dalam masyarakat. Berdasarkan teori kenegaraan pembahasannya merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan yuridis. Dari segi sosiologis yakni melihat bangunan negara sebagai suatu kebulatan (*Ganzheit*), maka pembahasannya adalah mengenai bentuk negara. Akan tetapi bila diinjau dari segi yuridis yang melihat bangunan negara dalam strukturnya/isinya maka pembahasannya adalah mengenai bentuk atau sistem pemerintahan.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang terdapat di bagian terbesar negara-negara di dunia ini, termasuk Negara Indonesia. Secara etimologis demokrasi terdiri atas kata-kata "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*cratein*" yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Maka dari sini kata atau istilah "demokrasi" dapat ditafsirkan dengan "pemerintahan rakyat", yakni suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi untuk pertama kalinya diterapkan di kota Athena adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu sistem pemerintahan dimana seluruh rakyat secara bersama-sama diikutsertakan dalam menetapkan garis-garis besar kebijakan negara baik dalam pelaksanaan maupun permasalahannya. Akan

tetapi, demokrasi langsung tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama masa sekarang. Ini dikarenakan zaman sekarang pertumbuhan penduduk yang begitu pesat dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi suatu negara, serta heterogenya berbagai kepentingan warga negaranya. Oleh karena itu, untuk zaman sekarang diterapkanlah demokrasi perwakilan.

Tokoh-tokoh yang memiliki andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya John Locke (dari Inggris), Montesquieu (dari Prancis), dan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Menurut John Locke ada dua asas terbentuknya negara yaitu *Pactum Unionis* yaitu perjanjian antarindividu untuk membentuk negara dan *Pactum Subjectionis* yaitu perjanjian antarindividu dengan negara yang dibentuknya.

Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, for the people*) yang kemudian kita kenal dengan demokrasi modern.

Ciri-ciri negara yang menganut asas kedaulatan rakyat atau demokrasi ialah :

- 1) Adanya lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat sebagai badan atau mejelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat.
- 2) Untuk menentukan anggota majelis tersebut di atas dilaksanakan pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu.
- 3). kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau mejelis itu yang bertugas mengawasi pemerintahan.
- 4). Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang dasar negara.

Syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi di bawah *Rule of Law* adalah :

- 1). Perlindungan konstitusional,
- 2). Adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- 3). Pemilihan umum yang bebas.
- 4). Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- 5). Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- 6). Pendidikan kewarganegaraan

Demokrasi kini dianggap sebagai pengorganisasian kehidupan yang paling mencerminkan kehendak bersama, tak jarang pasca runtuhnya rezim Soeharto banyak masyarakat Indonesia yang mengharapkan pelaksanaan demokrasi secara menyeluruh. Melalui demokrasi setiap orang banyak yang mengharapkan keputusan-keputusan untuk menentukan kehidupan yang kompetibel dan kolektif. Banyak juga yang mengharapkan demokrasi akan mampu mengurangi rasa ketidakadilan. Masyarakat Indonesia percaya dengan mekanisme politik seperti ini sehingga memunculkan harapan bahwa demokrasi seakan identik dengan kebebasan, keadilan dan persamaan. Sekian banyak masyarakat yang sangat mengharapkan buah dari demokrasi secara nyata, bukan hanya sekadar

mengkhayal pada romantisme. Tak pelak ketika demokrasi secara mata terbuka tidak menghasilkan apa yang diharapkan tentu ini menjadi sebuah kekecewaan besar di kalangan masyarakat.

Pada masyarakat yang terjadi justru yang berkembang hanyalah konflik kepentingan yang saling mendominasi. Kaum minoritas terlihat hanyalah menjadi boneka yang hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kepentingan suatu golongan tanpa bisa menyuarakan aspirasi secara substansi. Dalam sebuah sistem politik demokrasi tentu ada yang namanya wakil rakyat (DPR) dalam fungsinya sebagai wakil rakyat yang secara esensi seharusnya membela kepentingan rakyat secara keseluruhan. Tetapi ironis ketika wakil rakyat dalam hal ini hanyalah membela kepentingan golongan (Partai Politik) serta mengabaikan aspirasi dan keinginan masyarakat kelas menengah kebawah (*The middle class*). Dalam faktanya wakil rakyat hanya memiliki sebuah tujuan dan kepentingan tersendiri, mereka dapat melakukan sesuatu dan melakukan tindakan yang sangat tidak mungkin untuk dapat diamati oleh masyarakat dan dimonitor oleh rakyat banyak. Mekanisme politik yang seperti ini tentu tidaklah efektif seperti yang dijanjikan karena pada akhirnya hanya beberapa orang yang menjalankan kekuasaan itu. Masyarakat kelas menengah kebawah selalu dalam posisi paling bawah yang hanya mengharpkan belas kasihan negara. Tak heran apabila banyak masyarakat merasa kurang puas dengan sistem politik yang seperti ini, sehingga masyarakat selalu dipenuhi dengan tindakan pencurian, kejahatan, fitnah, saling tinds serta pembunuhan.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara berdasarkan pada konsep dan prinsip *trias politica* dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus tanggung jawab (*accountable*), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme



ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

Berdasarkan fakta di lapangan yang membuktikan bahwa pada sekarang ini yang terlihat jelas pada saat pelajar maupun mahasiswa melaksanakan demonstrasi masih banyak yang merusak berbagai fasilitas umum, dan biarpun negara kita memakai sistem pemerintahan demokrasi, namun pada kenyataannya masih terdapat banyak masyarakat terutama pada kalangan pelajar tingkat SMA yang belum mengerti benar mengenai demokrasi itu. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti akan berusaha untuk mengungkap lebih dalam mengenai bagaimana pemahaman siswa terhadap demokrasi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah<sup>2</sup>. diatas, maka penulis merumuskan masalah yakni Bagaimana pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya tentang demokrasi ?

Adapun tujuan penulis meneliti permasalahan<sup>3</sup>. diatas yakni sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya tentang demokrasi. Penelitian ini Secara teoritis, memberikan informasi tentang gambaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara praktis memberikan informasi kepada pembaca mengenai pemahaman siswa tentang demokrasi,<sup>4</sup>. sehingga bisa dijadikan bahan kebijakan untuk pendidikan politik.

Istilah demokrasi berasal dari penggalan bahasa Yunani "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratos*" yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Kata pemerintahan oleh rakyat memiliki konotasi, yakni pertama, suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, kedua, suatu pemerintahan oleh rakyat biasa bukan oleh kaum bangsawan, ketiga, suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*) atau yang sering disebut dengan *wong cilik*. Dalam demokrasi yang terpenting bukan hanya siapa yang memilih pemimpin, tetapi juga cara dia memimpin. Sebab jika cara memimpin negara tidak benar, baik karena rendahnya kualitas dan komitmen moral dari pemimpin itu sendiri, maupun karena budaya masyarakat setempat yang tidak kondusif, maka demokrasi hanya berarti pemerosan dari tirani oleh kaum bangsawan menjadi tirani oleh masyarakat bawah. Arti yang diberikan kepada kata demokrasi sangat beragam, sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya ruang-ruang

publik maupun melalui wakil. Wakil yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*). Selain itu, beberapa tokoh ahli telah memberikan pengertian terhadap demokrasi, antara lain sebagai berikut, Joseph A. Schumpeter berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik ketika individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan ketika keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan atas kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Philipp C. Schmitter dan Terry Lynn Karl berpendapat bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan ketika pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

Henry B. Mayo, yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu system dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. (Munir, 2010 : konsep Negara demokrasi)

Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal :

Pemerintah dari rakyat (*government of the people*), Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), Pemerintah untuk rakyat (*government for people*).

Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan. Pertama pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legitimate government*) dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligitimate government*) di mata rakyat.

Pemerintahan yang sah dan diakui berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan

yang diberikan oleh rakyat. Sebaliknya pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Pemerintahan dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintahan tersebut diperoleh melalui pemilihan dari rakyat, bukan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kedua, pemerintahan oleh rakyat, berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan diri dan keinginannya sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu pemerintah harus tunduk kepada pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan rakyat (*social control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui perwakilannya di parlemen (DPR). Dengan adanya pengawasan oleh rakyat (*social control*) akan menghilangkan ambisi otoritarianisme para penyelenggara negeri (Pemerintah dan DPR).

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas segalanya. Untuk itu pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-programnya, bukan sebaliknya hanya menjalankan aspirasi keinginan diri, keluarga dan kelompoknya. Oleh karena itu pemerintah harus membuka kanal-kanal (saluran) dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya<sup>2)</sup> baik melalui media pers maupun secara langsung.

Karena demokrasi dengan berbagai pernik-perniknya berupa pelaksanaan konsep perwakilan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pelaksanaan *rule of law*, perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan kesejahteraan rakyat, konsep *fairplay* dalam pemerintahan, dan sebagainya, telah menjadi kebutuhan masyarakat secara universal, maka dapat dipastikan bahwa demokrasi dengan berbagai konsepnya itu akan mendominasi kehidupan bernegara bagi masyarakat. Dalam hal ini berarti tidak ada alternatif lain bahkan lawan tanding yang bisa mengimbangi demokrasi.

Selanjutnya Demokrasi mempunyai kesan kebebasan, karena dalam demokrasi banyak hal terutama

tentang kebijaksanaan pemerintah dipertanyakan bahkan dikritik oleh rakyat secara terus menerus. Kegaduhan dan demonstrasi merupakan darah daging dari demokrasi. Tetapi hal tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan system pemerintahan yang terkesan tanpa adanya kebebasan, tetapi menikam dari belakang, seperti yang terjadi di Indonesia yakni pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan dimasa pemerintahan Soeharto.

Demokrasi hanya berbicara pada tataran mayoritas bukan totalitas. Karena itu ada pihak minoritas, misalnya mereka yang kalah dalam pemilihan umum. Hal ini terkesan bahwa mereka yang kalah suara merupakan musuh, tetapi musuh yang harus dibumihanguskan, sudah tentu musuh ini selalu kecewa dan ribut terus. Karena itulah, demokrasi terkesan menutupkan diri terhadap musuh-musuh tersebut. Jadi sulit ada suara konsensus dalam dunia politik. Yang sering terjadi adalah suara mayoritas, karena itu demokrasi memang harus punya nyali di samping tingkat kesabaran dan toleransi yang harus tinggi.

Di manapun dan kapanpun masyarakat tetap selalu mendambakan adanya demokrasi, dan di Negara manapun masyarakat sangat gandrung terhadap demokrasi sehingga demokrasi merupakan satu-satunya pilihan tanpa alternative lain. Tentunya hal ini tidak lepas dari beberapa faktor penyebab, yang antara lain sebagai berikut :

Faktor demokrasi prosedural. Dalam hal ini prosedur pengambilan putusan secara demokratis, yang kebanyakan daripadanya dilakukan secara mayoritas, dengan partisipasi rakyat yang sebanyak-banyaknya dengan penghargaan yang besar kepada kehendak rakyat, lebih dapat menjamin bahwa segala yang dilakukan dalam kehidupan dapat menjamin bahwa segala yang dilakukan dalam kehidupan bernegara akan sesuai dengan kehendak rakyat untuk mencapai kebenaran, kemakmuran, dan keadilan.

Faktor kepatuhan kepada keputusan pemerintah/masyarakat. Dalam hal ini, karena keputusan yang diambil secara demokratis dianggap keputusan yang diambil secara bersama, meskipun sebagian kecil mungkin telah dikalahkan dalam pemungutan suara, maka keputusan seperti itu dapat membawa kesejukan hati bagi rakyat yang telah merasa dihargai dan telah menyatakan pendapatnya misalnya melalui suatu pemilihan umum. Karena itu, keputusannya tersebut sangat besar kemungkinannya untuk dipatuhi oleh rakyat.

Faktor tujuan yang bersifat substantive yang hendak dicapai oleh suatu demokrasi. Dalam hal ini demokrasi mengandung begitu banyak manfaat yang hendak dicapai bagi kehidupan manusia dan masyarakat, seperti yang terdapat dalam kutipan berikut ini :

Demokrasi dipertahankan karena ia menghasilkan kebijaksanaan yang bijak, suatu masyarakat yang adil, suatu masyarakat yang bebas, keputusan-keputusan yang memajukan pengetahuan dan kegiatan intelektual dan sebagainya. (David Miller, et al., 183 : 254)

Faktor pencarian kebahagiaan manusia. Sesuai ajaran dari paham utilitarianisme bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya manusia (*the most happiness for the greatest people*), maka pengambilan putusan secara demokratis adalah yang paling mungkin mencapai kebahagiaan tersebut, karena proses pengambilan keputusan secara demokratis melibatkan semua anggota masyarakat yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak atas kebahagiaan (happiness) tersebut. Meskipun demikian demokrasi bukan hanya berkonotasi pada suatu sistem yang diterapkan kepada sekumpulan manusia yang berkumpul bersama-sama diikat oleh suatu kepentingan tertentu, sehingga mereka bersatu.

Jika dilihat dari segi bagaimana dan sejauhmana keterlibatan rakyat dalam suatu proses pengambilan keputusan, maka disini konsep negara demokrasi memunculkan tiga macam demokrasi, yaitu :

1). Demokrasi perwakilan, 2). Demokrasi langsung, 3). Demokrasi dengan partai tunggal. Demokrasi perwakilan (*representative democracy*) merupakan model demokrasi yang sangat banyak dianut sekarang, bahkan dapat dikatakan bahwa model demokrasi perwakilan inilah yang saat ini merupakan *stereotype* dari demokrasi kontemporer dan universal.

Dengan demokrasi perwakilan yang disebut juga sebagai demokrasi tidak langsung, yang dimaksudkan adalah bahwa para pejabat Negara yang pada prinsipnya dipilih oleh rakyat, menjalankan kekuasaan, kewenangan dan fungsinya dengan tujuan untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat yang diwakilinya, baik dalam distrik-distrik tertentu, ataupun secara keseluruhan. Tentu saja, dalam menjalankannya sangat patuh terhadap hukum dan tatakrma yang berlaku. Rakyat memilih wakilnya yang duduk dalam parlemen yang nantinya diharapkan akan mewakili kepentingan rakyat yang memilihnya. Karena itulah sistem demokrasi tidak langsung ini disebut juga dengan istilah demokrasi perwakilan.

Sementara itu, sistem demokrasi langsung (*direct democracy*,) atau yang sering juga disebut dengan sistem demokrasi partisipatif atau demokrasi murni (*pure democracy*), rakyat menentukan sendiri secara langsung setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan public tanpa melalui perwakilannya. Partisipasi tersebut dilakukan dengan melakukan pemungutan suara dari rakyat. Demokrasi langsung inilah yang sebenarnya

*prototype* dari demokrasi yang dipraktikkan dinegara-negara kota, atau dinegara-negara kuno tempo dulu.

Kemudian ada juga yang disebut demokrasi dengan model satu partai atau partai tunggal yakni, dimana dalam Negara tersebut hanya diijinkan untuk mempunyai satu partai saja. Terkadang terdapat lebih dari satu partai, tetapi partai lainnya sengaja didesain untuk menjadi pelengkap saja, demokrasi partai tunggal ini masih disebut dengan demokrasi, karena partai tunggal dalam Negara tersebut juga mengklaim dirinya bertindak atas nama rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. (Fuady munir, 2010 : konsep negara demokrasi)

Secara esensial penanaman nilai-nilai demokrasi adalah untuk melahirkan budaya demokrasi baru dalam rangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal. Karena demokrasi tidak hanya sekedar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik, namun lebih dari itu. Demokrasi didalamnya menyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan penanaman nilai-nilai yang menjadi harapan, oleh karena itu demokrasi tidak hanya merujuk pada kondisi realitas tatanan atau sistem yang sudah ada, penanaman nilai-nilai demokrasi harus mampu melakukan berbagai inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi. Penanaman nilai-nilai demokrasi dalam arti lebih spesifik dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk mengubah proses sosialisasi demokrasi dalam masyarakat sehingga masyarakat betul-betul memahami sistem demokrasi dan hendak diwujudkan (Nasiwan 24;6)

Menurut sosiolog Universitas Airlangga, Hotman M Siahaan, kultur demokrasi bagi bangsa Indonesia belum terbangun sehingga pemerintah harus berani mengambil terobosan yang salah satunya melalui penanaman nilai-nilai demokrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya aksi protes dari beberapa kalangan yang berakhir dengan bentrokan fisik. Diskursus demokrasi tidak muncul, pada hal semestinya demokrasi menciptakan konsensus dialog antara pemerintah dan rakyat. Pada hakikatnya penanaman nilai-nilai demokrasi yakni memberikan atau membimbing masyarakat agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara saling mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam penanaman nilai-nilai demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, yakni demokrasi sebagai konsep, dan demokrasi sebagai praksis.

Demokrasi sebagai konsep merupakan berbicara mengenai arti makna dan sikap perilaku yang tergolong demokratis sedang sebagai praksis sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem. Sebagai suatu sistem, kinerja demokrasi terikat suatu peraturan main



tertentu, apabila dalam sistem itu ada orang yang tidak mentaati aturan main yang telah disepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti demokrasi. Kehidupan demokrasi di Indonesia belum seperti yang diharapkan, banyak timbul persoalan-persoalan yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, kebenaran diputar balikkan dan terjadi mafia peradilan, semakin terpuruknya kondisi bangsa, karena banyak pejabat yang mementingkan dirinya sendiri, selain itu juga timbul kelompok-kelompok partisan yang sulit dikontrol pemerintah dan dan reformasi tidak memberi perubahan yang signifikan untuk kemakmuran rakyat, dalam kondisi diatas sangat diperlukan penanaman nilai-nilai demokrasi terutama pada anak yang masih dalam usia remaja, yang nantinya dengan adanya penanaman nilai-nilai demokrasi pada anak yang masih dalam usia remaja diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan segala persoalan berbangsa dan bernegara, sekaligus memberi pencerahan dengan adanya partisipasi masyarakat secara nyata. Penanaman nilai-nilai demokrasi adalah suatu proses pendekatan yang digunakan secara komprehensif, penanaman ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik dilingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat didalamnya. Dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi pemimpin formal, dan non formal bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan demokrasi, baik ranah organisasi negara, maupun organisasi masyarakat.

Udin (dalam Denny, 2006;16), menyatakan bahwa dalam demokrasi untuk mewujudkan masyarakat sipil berlaku adigium " *Democracy is not inherited but is learned* " Demokrasi bukan hal yang harus diturunkan tetapi harus diajarkan. Menurut Denny dalam terancamnya konsolidasi Demokrasi ada tiga variabel utama dalam mewujudkan demokrasi, yakni, pertama pertumbuhan ekonomi, jika ekonomi suatu negara tidak tumbuh maka negara itu tidak akan mencapai demokrasi, variabel kedua yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi adalah kultur liberal, yaitu nilai-nilai yang terlepas dari isu SARA dan jender, dan variabel ketiga yakni kesepakatan elit, yaitu tentang kesepakatan aturan main dalam kehidupan politik (Denny, 2006;16). Menurut Mayo nilai-nilai demokrasi yang harus ada yakni, penyelesaian konflik secara damai dan melembaga, menjamin perubahan secara damai, penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan, menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat dan menjamin tegaknya keadilan. Nilai-nilai tersebut diatas harus disosialisasikan terutama mulai pada anak dalam usia remaja baik melalui pendidikan formal atau sekolah, maupun non formal atau keluarga, yang nantinya

diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara.

Dalam hal konsep demokrasi mempunyai bermacam-macam istilah, antarlain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*. Adapun ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pebatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi.

Gagasan bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi pernah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris yakni Lord Acton, dengan mengingat bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Dalilnya yang termasyhur berbunyi " Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalah gunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula. Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai-nilai yang diwariskan dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani Kuno pada abad ke-6 merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, dan lagi pula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari jumlah penduduk.

Dalam negara modern demokrai tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter sekolah seharusnya diimbangi dengan pendidikan karakter di lingkup keluarga (*stake holdersnya*) supaya karakter dapat terbentuk dengan lebih baik melalui pijakan tersebut. Karakter dikembangkan

melalui tahap pengetahuan, pelaksanaan, dan pembiasaan. Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, bagaimanapun tidak bisa terlepas dari alur periodisasi sejarah politik di Indonesia, yakni apa yang disebut sebagai periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, dan pemerintahan orde baru.

## 1. Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan.

Para penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Hal itu terjadi karena latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya, bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Dalam membicarakan mengenai demokrasi pada masa ini tidak terlalu banyak yang akan dibahas, kecuali beberapa hal yang fundamental, karena merupakan peletakkan dasar bagi demokrasi di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya.

Pertama, *political franchise* yang menyeluruh. Sudah sejak semula para pembentuk negara berkomitmen besar terhadap demokrasi sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sebab, pemerintah harus memusatkan seluruh energinya untuk bersama-sama dengan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap terwujud.

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan, dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti imperialisme dan

kolonialisme. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu sudah merupakan salah satu agenda politik yang utama. Pemilihan umum yang sangat terbatas sifatnya baru dijalankan di beberapa wilayah negara, misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Utara.

## 2. Demokrasi Parlementer

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pemerintahan pada masa ini merupakan pemerintahan yang parlementer, karena pada masa ini merupakan kejayaan parlemen dalam sejarah politik Indonesia.

Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya di kehidupan politik di Indonesia. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media masa sebagai alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas tersebut.

Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem banyak partai (*multy party sistem*). Ada hampir 40 partai politik yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen internal partai boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya.

Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali yakni pada tahun 1955 tetapi Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antara partai politik berjalan dengan intensif. Partai-partai politik dapat melakukan nominasi calonnya dengan bebas, kampanye dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dalam rangka mencari dukungan yang kuat dari masyarakat pemilih. Undang-undang pemilihan umum tahun 1955 merupakan landasan untuk berpijak yang sangat demokratis dan tidak memberikan peluang kepada panitia Pemilihan Umum di Indonesia untuk melakukan



pengaturan lebih lanjut. Dengan demikian, Pemilihan Umum berjalan dengan sangat kompetitif sebagaimana halnya dalam suatu pemerintahan yang demokratis, sekalipun Pemilihan Umum tersebut tidak dapat melahirkan satu partai politik yang kuat, yang mampu membentuk eksekutif.

Kelima, Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas, dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum. Menurut istilah sekarang yang tumbuh ibarat cendawan di musim hujan. Kebebasan baik dapat dirasakan dengan baik, karena tidak dikenal adanya lembaga yang menghambat kebebasan tersebut. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat (*freedom of expression*). Masyarakat yang mampu melakukannya dapat saja menggunakan haknya tanpa ada rasa khawatir untuk menghadapi resiko, sekalipun mengkritisi pemerintah dengan sangat keras.

Demokrasi parlementer tidak berumur panjang, yaitu antara tahun 1950 sampai 1959, ketika Soekarno sebagai presiden mengeluarkan dekrit pada 5 juli 1959, yang isinya yakni tentang membubarkan konstituante dan menyatakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Orang yang pertama mencoba menjelaskan masalah ini adalah Hebert Feith (1962). Didalam karyanya yang monumental, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Feith mengajukan tesis bahwa kegagalan demokrasi parlementer di Indonesia adalah karena adanya dua gaya kepemimpinan yang sangat berbeda diantara kalangan elite Indonesia pada masa pasca kemerdekaan, yaitu disatu pihak apa yang disebut Feith sebagai *solidarity makers* dan lain pihak dimasukkan kedalam kategori *administrator* atau *problem solver*. Mereka mempunyai visi, gaya, kecakapan dan basis kepemimpinan yang berada didalam mencoba membawa Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang modern. Sehingga kemudian terjadi konflik yang berkepanjangan diantara kedua jenis kelompok elite tersebut, yang akhirnya menggagalkan proses demokrasi itu sendiri. Kinerja dari demokrasi parlementer mempunyai kaitan yang sangat erat dengan topangan ekonomi yang masih sangat lemah. Menurut ilmuwan politik Seymour Martin Lipset mengatakan bahwa demokrasi baru akan berjalan dengan baik kalau ditopang oleh kondisi social ekonomi yang kuat. Terutama dilihat dari besar kecilnya pendapatan perkapita masyarakat, tinggi rendahnya kemampuan baca-tulis (*literacy*), urbanisasi, dan besar kecilnya masyarakat yang terekspose di media massa. Berdasarkan konsep ini maka sangatlah tidak mengherankan apabila demokrasi parlementer

mengalami kegagalan di dalam memperlihatkan kinerjanya, karena pada waktu itu tingkat pendapatan perkapita masyarakat masih sangat rendah. Demikian juga dengan kemampuan baca dan tulis, yang hanya baru mencapai sekitar 20 % saja. Logikanya adalah, bagaimana orang dapat berpolitik dan menggunakan hak-hak politik dengan baik dan penuh tanggung jawab kalau masyarakatnya masih sangat tradisional.

### 3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidak senangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Bahkan pernah pada suatu kesempatan di Istana Merdeka beliau melontarkan keinginannya untuk membubarkan saja partai-partai politik. Di samping itu, beliau juga melontarkan gagasan, bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong dan kekeluargaan. Selanjutnya beliau menekankan bagaimana besarnya peranan pemimpin dalam proses politik yang dalam masyarakat kita. Kemudian beliau juga mengusulkan, agar terbentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong, yang melibatkan semua kekuasaan politik yang ada, termasuk partai komunis Indonesia yang selama ini tidak pernah terlibat secara resmi dalam koalisi kabinet. Untuk mewujudkan gagasan tersebut kemudian Soekarno mengajukan usulan yang dikenal sebagai "Konsep Presiden". Melalui konsepsi tersebut kemudian terbentuklah Dewan Nasional yang melibatkan semua partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Konsepsi Presiden dan terbentuknya Dewan Nasional mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik. Penentang Konsepsi Presiden menyatakan, bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggaran yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena lembaga tersebut tidak dikenal dalam konstitusi. Pada saat yang sama, sejumlah faktor lain muncul secara hampir bersamaan. Pertama, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah semakin memburuk, kedua Dewan Konstituante ternyata mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan guna merumuskan ideologi nasional, karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik yakni kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar Negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai dasar Negara.

### 4. Demokrasi dalam pemerintahan orde baru.

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1965 sampai 1968, yakni ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Orde baru

memberikan pengharapan baru, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter menjadi lebih demokratik. Namun pada kenyataannya berbeda, karena tidak terdapat perubahan dari kehidupan politik dari orde lama dengan orde baru.

Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam perjalanan politik orde baru, kekuasaan Kepresidenan masih merupakan pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia, selain itu rotasi kekuasaan eksekutif yang seharusnya terjadi, dalam orde baru hampir tidak pernah terjadi. Kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah.

Demokrasi mempersyaratkan adanya kemungkinan rotasi kekuasaan, tetapi, hal itu hampir tidak mungkin terjadi di Indonesia pada pemerintahan orde baru. Dalam pemerintahan orde baru recruitment politik tertutup, karena merupakan proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara. Termasuk didalamnya adalah jabatan eksekutif, legislatif, dan berbagai jabatan lembaga tinggi Negara lainnya, seperti Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, dan lain-lain. Dalam Negara yang demokratis, semua warga Negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik. Pada masa pemerintahan orde baru pemilihan umum telah dilangsungkan sebanyak enam kali, dengan frekuensi yang teratur, yaitu setiap lima tahun sekali. Tetapi pelaksanaan pemilu pada waktu itu masih jauh dari semangat demokrasi. Karena persaingan antara parpol yang kuat masih mendominasi, dengan tidak adanya keseimbangan dalam kemenangan atau perolehan suara, dengan berbagai cara, yakni yang pertama, melalui seperangkat peraturan pemilihan yang ada, yang memungkinkan lembaga pemilihan umum, dan panitia pemilihan umum dengan memainkan peranan yang sangat dominan, dimulai dari Undang-Undang Pemilihan Umum sampai seperangkat peraturan pelaksanaannya. Kedua, mekanisme penyelenggaraan, misalnya nominasi calon anggota wakil rakyat, pengaturan dan pelaksanaan kampanye, pemberian dan perhitungan suara, dan lain sebagainya. Pemilihan umum yang digambarkan sebagai pesta demokrasi tidak jarang menimbulkan sejumlah masalah. Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerasan.

##### **5. Demokrasi di era reformasi (1998 – Sekarang)**

Runtuhnya Orde Baru ditandai dengan adanya krisis kepercayaan yang direspon oleh kelompok penekan (pressure group) dengan mengadakan berbagai macam demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, LSM, politisi, maupun masyarakat. Runtuhnya kekuasaan rezim orde baru telah memberikan harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa peralihan demokrasi ini merupakan masa yang sangat rumit dan kritis karena pada masa ini akan ditentukan kearah mana demokrasi akan dibangun. Keberhasilan dan kegagalan

suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor, yaitu:

1) komposisi elite politik, 2) desain institusi politik, 3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non elite politik, 4) peran masyarakat madani.

Keempat faktor tersebut harus berjalan sinergis sebagai modal untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Sedangkan Azyumardi Azra menyatakan langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar, yaitu:

1). Reformasi konstitusional (constitutional reform) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik. 2). Reformasi kelembagaan (institutional reform and empowerment), yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik. 3). Pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang lebih demokratis.

Sedangkan dinamika demokrasi pada masa reformasi dapat dilihat berdasarkan aktifitas kenegaraan sebagai berikut :

1). Dikeluarkannya Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, memberikan ruang dan gerak lebih luas untuk mendirikan partai politik yang memungkinkan berkembangnya multipartai. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris”. 2). Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota maupun DPD. Bahkan pemilihan presiden dan wakilnya juga dilaksanakan secara langsung. 3). Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, berwibawa dan bertanggung jawab dibuktikan dengan keluarnya ketetapan MPR No.IX/MPR/1998 dan ditindak lanjuti dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya. 4). Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif, sehingga terjadi check and balance. 5). Lembaga tertinggi negara MPR berani mengambil langkah-langkah politik dengan adanya sidang tahunan dan menuntut kepada pemerintah dan lembaga negara lain untuk menyampaikan laporan kemajuan (progress report). 6). Adanya kebebasan media massa tanpa ada rasa takut untuk dicabut surat Ijin penerbitannya. 7). Adanya pembatasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden paling lama adalah 2

periode masa kepemimpinan. (Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung : PT Refika Aditama). Berikut ini adalah beberapa Prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli, pertama Menurut Masykuri Abdillah. Prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralism. Selanjutnya menurut Robert A. Dahl, menurut beliau terdapat 6 Prinsip-prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu : a). Kontrol atas keputusan pemerintah, b). Pemilihan yang teliti dan jujur, c). Hak memilih dan dipilih, d). Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, e). Kebebasan mengakses informasi, f). Kebebasan berserikat. selanjutnya menurut Blaug dan Schwarzmante, terdapat 5 nilai universal demokrasi, yaitu, a). Kebebasan dan otonomi (freedom and autonomy), b). Persamaan (equality), c). Perwakilan (representation), d). Kekuasaan mayoritas (majority rule), e). Kewarganegaraan (citizenship).

Prinsip-prinsip demokrasi menurut Riswandha, Prinsip-prinsip demokrasi yang dikehendaki rakyat adalah, a). Demokrasi yang deliberatif (mengutamakan musyawarah), b). Substantif (mengena ke akar permasalahan), c). Partisipatif (melibatkan seluruh rakyat). Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip demokrasi menurut Melvin Urofsky, yang telah dikenal dan diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi tumbuh berkembang, yaitu :

a). Pemilihan umum yang demokratis. b). Federalisme pemerintahan negara bagian dan local. c). Pembuatan Undang-Undang. d). Sistem peradilan yang independen. e). Kekuasaan lembaga kepresidenan. f). Peran media yang bebas. g). Peran kelompok-kelompok kepentingan. i). Hak masyarakat untuk tau. j). Perlindungan atas hak-hak minoritas. k). Kontrol sipil atas militer. (Huda, Ni' matul. 2010. *Hukum Tata Negara*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada ).

Demokrasi pada awal pertumbuhan memiliki 2 pengertian yaitu Demokrasi dalam arti sempit mencakup pengertian dalam bidang politik, yaitu tentang pengakuan HAM, seperti hak kemerdekaan pers, hak berpendapat, dan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Demokrasi dalam arti luas, selain meliputi sistem politik juga mencakup sistem sosial dan sisitem ekonomi. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil; dan. 2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah

untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. (Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Dian Rakyat).

Demokrasi bukan hanya merupakan sistem pemerintahan saja, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu. Oleh karena itu, demokrasi mengandung unsur-unsur nilai (value). Henry B Mayo telah mencoba untuk merinci nilai-nilai ini, namun dengan catatan tidak semua masyarakat yang demokrasi menganut nilai-nilai yang dirinci ini.

Beberapa nilai demokrasi yang disampaikan oleh Henry B Mayo, yaitu:

1). Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan dianggap wajar untuk diperjuangkan dalam alam demokrasi. Perselisihan-persilihan itu harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog yang terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. 2). Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dalam setiap masyarakat yang modern akan terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor perkembangan teknologi, perubahan-perubahan pola kepadatan penduduk, pola-pola perdagangan dan sebagainya. Pemerintah harus dapat mengambil suatu kebijakan kepada perubahan-perubahan ini. 3). Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4). Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Golongangolongan minoritas, yang sedikit banyak akan terkena paksaan, akan lebih menerima bila diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif. Mereka dapat lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat. 5). Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. 6). Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena itu golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil. (Gaffan, Affan. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar Offset.)

Syarat-syarat pemerintahan demokrasi :

1) Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara. 2). Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak. 3). Pemilihan umum yang bebas. 4). Kebebasan untuk menyampaikan pendapat. 5). Kebebasan untuk berorganisasi. (Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Dian Rakyat).

Unsur-unsur budaya demokrasi adalah :



1). Kebebasan, adalah keleluasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermamfaat untuk kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Bukan kebebasan untuk melakukan hal tanpa batas. Kebebasan harus digunakan untuk hal yang bermamfaat bagi masyarakat, dengan cara tidak melanggar aturan yang berlaku. 2). Persamaan, adalah Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Di dalam masyarakat manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, politik, mengembangkan kepribadiannya masing-masing, sama haknya untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3). Solidaritas, adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerjasama dengan orang lain. Solidaritas sebagai perekat bagi pendukung demokrasi agar tidak jatuh kedalam perpecahan. 4). Toleransi, adalah sikap atau sifat toleran. Toleran artinya bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dll) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. 5). Menghormati kejujuran, adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran, agar hubungan antar pihak berjalan baik dan tidak menimbulkan benih-benih konflik di masa depan. 6). Menghormati penalaran, adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Kebiasaan memberipenalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak cara untuk mencapai tujuan. (Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Dian Rakyat)

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian studi komparasi dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif dirasa cocok untuk digunakan dalam penelitian ini, karena berusaha untuk mendeskripsikan pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya tentang demokrasi. Melalui metode ini diharapkan mampu memaparkan masalah dengan jelas, menyeluruh dan mendalam. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ialah beberapa Sekolah Tingkat Menengah Atas kota Surabaya. waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni mulai dari tahap pengajuan judul sampai pada penyusunan laporan penelitian.

Populasi Menurut Suharsimi Arikunto (1999 : 99), populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SMA kota Surabaya, yang dalam hal ini jumlah dari keseluruhan sekolah tingkat menengah atas di kota

Surabaya berjumlah total seratus lima puluh sekolah. ([http://www.ban-sm.or.id/provinsi/jawa timur/akreditasi/index](http://www.ban-sm.or.id/provinsi/jawa_timur/akreditasi/index) )

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Untuk sekedar pedoman, maka apabila subyeknya kurang dari 100 (seratus), lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih dari 100 (seratus) maka diambil antara 10%-15%-20%-25% atau lebih". (Arikunto, 2006 : 107). Dalam penentuan sampel pada penelitian ini digunakan teknik *cluster sampling*, yakni teknik penentuan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Teknik cluster sampling ini sering digunakan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah tersebut. Dalam penelitian ini mengingat sumber data yang akan diteliti sangatlah luas maka digunakanlah teknik cluster sampling, karena bertujuan untuk menentukan sampel daerah yang dalam hal ini adalah berdasarkan pada pembagian wilayah kota Surabaya dimana terdiri dari Surabaya bagian utara, timur, selatan, dan barat, meskipun demikian karena berbagai alasan peneliti hanya bisa mengambil sampel sekolah swasta dan Madrasah Aliyah Negeri, untuk itu yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah SMA Barunawati yang mewakili wilayah Surabaya utara, SMA Dr. Soetomo mewakili wilayah Surabaya timur, SMA Kartika IV-3 mewakili Surabaya barat, dan Madrasah Aliyah Negeri yakni yang mewakili Surabaya selatan. Adapun yang dijadikan responden adalah siswa kelas 2, karena mereka sudah bisa dipandang cukup dalam hal pengetahuan yang bisa digunakan sebagai alat untuk memperoleh data yang di inginkan. Dimana dalam hal penentuan jumlah sampelnya yakni mengacu pada penentuan jumlah sampel statistik yakni sebesar lebih dari lima puluh persen dari jumlah siswa kelas dua pada tiap-tiap sekolah.

Variabel penelitian berkaitan dengan objek kajian yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2006: 96), variabel adalah suatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian atau obyek penelitian. Variabel dalam penelitian ini ialah pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya tentang Demokrasi. Definisi operasional variabel (DOV) dalam penelitian ini adalah: Tingkat pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya tentang demokrasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan Angket, karena angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden mengenai hal-hal yang ingin diketahui peneliti. Adapun

pengumpulan data dalam penelitian ini yakni menggunakan angket terbuka, yaitu salah satu jenis angket dimana item pertanyaan pada angket berbentuk uraian yang nantinya responden diharapkan bisa mengisi angket dengan leluasa, sehingga nantinya data yang diperoleh diharapkan untuk bisa lebih lengkap. Angket digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya tentang demokrasi.

Analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk menggeneralisasikan atau menarik kesimpulan. Data dari penelitian harus dianalisis agar teruji kebenarannya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan statistik angka dan kemudian dideskriptifkan, karena tidak mungkin pembaca mampu mengetahui isi dari penelitian tanpa adanya analisis data. Statistik berarti cara-cara ilmiah yang mempersiapkan untuk mengumpulkan data, menyusun, menyajikan dan menganalisis, dapat berwujud angka-angka. Lebih jauh lagi statistik yang diharapkan dapat menyediakan jawaban untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang benar serta untuk mengambil keputusan yang baik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya tentang demokrasi dibandingkan dengan teori, dalam hal ini berarti bahwa dari hasil angket yang telah diperoleh nantinya akan dicocokkan dengan teori yang ada, dan masing-masing teori mempunyai presentase yakni 100%.

Selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat dikualifikasikan maka perlu ditentukan kriteria penilaian sebagai berikut :

0% - 20% = Sangat Tidak Paham

21% - 40% = Kurang Paham

41% - 60% = Cukup Paham

61% - 80% = Paham

81% - 100% = Sangat Paham

Kemudian hasil dari perhitungan berupa persentase dan dijelaskan secara deskriptif. Dengan demikian akan diperoleh kebenaran data yang dapat menggambarkan pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya tentang demokrasi.

#### a. Pemahaman Siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Pengertian Demokrasi.

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal pengertian demokrasi				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	33,02 %	11,15 %	54,11 %	0,75%	0%
Sma barunawati Surabaya	62,84 %	9,92%	7,78 %	11,65 %	7,78%
Sma Dr. Soetomo Surabaya	29,11 %	6,61%	47,9 %	0%	0,87%
MAN Surabaya	26,04 %	12,90 %	15,58 %	39,59 %	5,07%
<b>Hasil Rata-rata</b>	<b>37,75 %</b>	<b>10,16 %</b>	<b>31,34 %</b>	<b>12,99 %</b>	<b>3,43%</b>

#### b. Pemahaman Siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Konotasi Kata Pemerintahan yang Dimaksudkan Dalam Demokrasi.

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal konotasi kata pemerintahan yang dimaksudkan dalam demokrasi				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	59,17 %	36,97 %	2,22 %	0,83%	0,73 %
Sma barunawati Surabaya	76,79 %	21,36 %	1,51 %	0%	0%
Sma Dr. Soetomo Surabaya	60,30 %	29,92 %	5,88 %	0 %	0 %
MAN Surabaya	56,42 %	37,15 %	3,60 %	0,8%	0%
<b>Hasil Rata-rata</b>	<b>63,89 %</b>	<b>26,6%</b>	<b>3,10 %</b>	<b>0,40 %</b>	<b>0,18 %</b>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**c. Pemahaman Siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal cara Pelaksanaan Demokrasi.**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal cara Pelaksanaan Demokrasi				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	57,02 %	23,06 %	4,9%	0%	0%
Sma barunawati Surabaya	80,24 %	14,47 %	3,23 %	0%	0%
Sma Dr. Soetomo Surabaya	88,1 %	11,89 %	0 %	0 %	0 %
MAN Surabaya	76,02 %	17,59 %	3,28 %	2,52%	0,43 %
<b>Hasil Rata-rata</b>	<b>75,34 %</b>	<b>16,75 %</b>	<b>2,85 %</b>	<b>0,63 %</b>	<b>0,10 %</b>

**d. Pemahaman Siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Adanya Istilah Kekuasaan Pemerintahan Berada Ditangan Rakyat**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal adanya istilah kekuasaan pemerintahan berada ditangan rakyat.				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	48,45 %	29,82 %	14,10 %	7,70%	0.73 %
Sma barunawati Surabaya	71,69 %	24,18 %	6,47 %	0%	0%
Sma Dr. Soetomo Surabaya	49,03 %	38,37 %	14,33 %	2,63 %	0 %
MAN Surabaya	41,02 %	30,62 %	14,98 %	2,52%	1,30 %
<b>Hasil Rata-rata</b>	<b>52,5</b>	<b>30,74</b>	<b>12,47</b>	<b>0,63</b>	<b>0,50</b>

	%	%	%	%	%
--	---	---	---	---	---

**e. Pemahaman Siswa SMASwasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Nilai Kebebasan Pada Demokrasi.**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal nilai kebebasan pada demokrasi.				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	56,16 %	16,13 %	21,64 %	0.73%	0 %
Sma barunawati Surabaya	77,32 %	19,43 %	3,23 %	0%	0%
Sma Dr. Soetomo Surabaya	50,33 %	35,12 %	14,52 %	0 %	0 %
MAN Surabaya	51,42 %	30,22 %	9,01 %	6,18%	3,25 %
<b>Hasil Rata-rata</b>	<b>75,34 %</b>	<b>16,75 %</b>	<b>2,85 %</b>	<b>0,63 %</b>	<b>0,10 %</b>

**f. Pemahaman Siswa SMASwasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Tiga Macam Demokrasi Jika Dilihat Dari Segi Bagaimana Dan Sejauh Mana Keterlibatan Rakyat Dalam Suatu Proses Pengambilan Keputusan.**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal tiga macam demokrasi jika dilihat dari segi bagaimana dan sejauh mana keterlibatan rakyat dalam suatu proses pengambilan keputusan.				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	88,93 %	4,92%	0,75 %	5,37%	0 %
Sma barunawati Surabaya	90,25 %	3,03%	5,17 %	1,65%	0%
Sma Dr. Soetomo	93,98	0%	0,87	5,13	0 %



Surabaya	%		%	%	
MAN Surabaya	76,15 %	3,91%	8,12 %	11,89 %	0,35 %
<b>Hasil Rata-rata</b>	87,32 %	2,96%	3,72 %	6,01%	0,08 %

Surabaya	%				%
MAN Surabaya	85,58 %	5,15%	0,42 %	0,8%	8,03 %
<b>Hasil Rata-rata</b>	80,97 %	5,02%	0,31 %	3,21 %	5,35 %

**g. Pemahaman Siswa SMASwasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Nilai- Nilai Yang Terkandung Dalam Demokrasi.**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi.				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	73,90 %	9,48%	10,13 %	1,59 %	0 %
Sma barunawati Surabaya	72,09 %	18,18 %	4,75 %	32,35 %	1,72 %
Sma Dr. Soetomo Surabaya	86,21 %	12,02 %	0,87 %	0 %	0,87 %
MAN Surabaya	70,48 %	23,52 %	4,67 %	0,87%	0,43 %
<b>Hasil Rata-rata</b>	75,67 %	15,8%	5,10 %	8,70 %	2,10 %

**i. Pemahaman Siswa SMASwasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Karakteristik Utama Dari Demokrasi Parleментар.**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal Karakteristik Utama Dari Demokrasi Parleментар.				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	91,98 %	6,43%	0,83 %	0%	0.73 %
Sma barunawati Surabaya	83,17 %	16,82 %	0%	0%	0%
Sma Dr. Soetomo Surabaya	96,48 %	2,63%	0,87 %	0 %	0 %
MAN Surabaya	79,39 %	15,91 %	2,74 %	1,95%	0,42 %
<b>Hasil Rata-rata</b>	75,34 %	10,44 %	1,11 %	0,48 %	0,28 %

**h. Pemahaman Siswa SMASwasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Ciri Khas Dari Demokrasi Konstitusional.**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal ciri khas dari demokrasi konstitusional.				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	65,39 %	4,16%	0,83 %	0%	9,09 %
Sma barunawati Surabaya	77,95 %	6,47%	0%	12,06 %	3,44 %
Sma Dr. Soetomo	94,7 %	4,31%	0%	0%	0,87 %

**j. Pemahaman Siswa SMASwasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya Tentang Demokrasi**

**Dalam Hal Gambaran Umum Dari Demokrasi Terpimpin.**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal Gambaran Umum Dari Demokrasi Terpimpin.				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	93,55 %	5,68%	0%	0,75%	0%
Sma barunawati Surabaya	93,30 %	4,96%	1,72 %	0%	0%
Sma Dr. Soetomo Surabaya	92,98 %	7,01%	0 %	0 %	0 %
MAN Surabaya	81,50 %	13,31 %	4,8%	0,36%	0%
<b>Hasil Rata-rata</b>	90,33 %	1,63%	0,27 %	7,77%	0%

**Dalam Hal Asas-Asas Pokok Yang Terkandung Pada Demokrasi.**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal Asas-Asas Pokok Yang Terkandung Pada Demokrasi.				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	84,88 %	4,52%	1,51 %	0%	9,06 %
Sma barunawati Surabaya	89,39 %	4,54%	1,51 %	0%	4,54 %
Sma Dr. Soetomo Surabaya	96,55 %	2,56%	0,87 %	0 %	0 %
MAN Surabaya	89,60 %	2,99%	0,35 %	0,71%	6,32 %
<b>Hasil Rata-rata</b>	90,10 %	3,65%	1,06 %	0,17 %	4,98 %

**k. Pemahaman Siswa SMASwasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Prinsip-Prinsip yang Termuat Pada Demokrasi.**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal Prinsip-Prinsip yang Termuat Pada Demokrasi.				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	64,31 %	15,15 %	7,93 %	1,31 %	4,92 %
Sma barunawati Surabaya	76,01 %	19,22 %	4,75 %	0%	0%
Sma Dr. Soetomo Surabaya	96,48 %	3,50%	0%	0 %	0 %
MAN Surabaya	75,74 %	17,81 %	4,71 %	1,70%	0%
<b>Hasil Rata-rata</b>	78,13 %	13,92 %	4,34 %	0,75 %	1,23 %

**m. Pemahaman Siswa SMASwasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Syarat-Syarat Pemerintahan Demokrasi .**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini diperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal Asas-Asas Pokok Yang Terkandung Pada Demokrasi.				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	79,02 %	11,61 %	4,69 %	0%	4,65 %
Sma barunawati Surabaya	60,28 %	19,85 %	4,96 %	4,96%	9,92 %
Sma Dr. Soetomo Surabaya	95,67 %	4,31%	0%	0 %	0 %
MAN Surabaya	84,47 %	6,92%	3,11 %	0,71%	4,76 %
<b>Hasil Rata-rata</b>	79,86 %	10,67 %	3,19 %	1,41 %	4,83 %

**l. Pemahaman Siswa SMASwasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya Tentang Demokrasi**

**n. Pemahaman Siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya Tentang Demokrasi Dalam Hal Unsur-Unsur Budaya Demokrasi.**

Berdasarkan data instrumen penelitian berupa angket, Pada tahapan ini terperoleh presentase pemahaman sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi dalam hal Unsur-Unsur Budaya Demokrasi				
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham	Paham	Sangat paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	79,66 %	0,75%	11,94 %	0,75%	6,87 %
Sma barunawati Surabaya	66,13 %	45,45 %	24,13 %	0%	5,17 %
Sma Dr. Soetomo Surabaya	98,37 %	0,81%	0,81 %	0 %	0 %
MAN Surabaya	92,53 %	1,95%	3,26 %	0,72%	0,72 %
<b>Hasil Rata-rata</b>	84,17 %	12,24 %	10,03 %	0,36 %	3,19 %

Berdasarkan perolehan data diatas dapat disimpulkan hasil perolehan prosentase pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya tentang demokrasi, yakni sebagai berikut,

Variasi	Pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi.		
	Sangat tidak paham	Kurang paham	Cukup paham
Sma kartika IV-3 Surabaya	82%	9%	9%
Sma barunawati Surabaya	93%	5%	2%
Sma Dr. Soetomo Surabaya	93%	6%	1%
MAN Surabaya	88%	6%	6%
<b>Hasil Rata-rata</b>	356	25,12	16,31

Berdasar kesimpulan perolehan data diatas maka dapat dikatakan bahwa presentase pemahaman siswa

SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya tentang demokrasi yakni jumlah yang tidak paham pada tiap-tiap sekolah terbilang antara 82%-93% dan setelah dirata-rata terdapatlah jumlah presentase 89%. Untuk tingkat kategori cukup paham jumlah persentasenya pada tiap-tiap sekolah terbilang antara 5%-9%, dan setelah dirata-rata jumlah presentase pada kategori ini hanya 6,5%.

Selanjutnya pada kategori tingkatan untuk paham jumlah persentasenya antara 1%-9%, sehingga setelah dirata-rata hasil dari persentasenya pada kategori tingkatan paham dari pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negerikota Surabaya tentang demokrasi maka terbilang hanya 4,5%. Walaupun semua sekolah rata-rata tingkat pemahaman siswanya tentang demokrasi pada tingkatan kategori paham persentasenya sangatlah sedikit hanya antara 1%-9%, dan di dominasi oleh kategori tingkatan tidak paham dengan jumlah persentasenya antara 82%-93%, namun dari sinilah dapat dilihat perbandingannya dari semua sekolah, dan sekolah yang paling tinggi tingkat kepahamannya tentang demokrasi yakni terlihat pada SMA KARTIKA IV-3 Surabaya, dengan perolehan skor tidak paham 82%, skor cukup paham 9%, dan skor paham 9%.

Demokrasi ini merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan), tapi pemahaman yang sederhana adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pentingnya demokrasi untuk suatu negara adalah dalam menyelesaikan masalah dapat melalui musyawarah sampai menghasilkan hasil mufakat dan harus berdasarkan akal pikiran yang sehat, pendapat setiap warga negaranya wajib untuk didengar dan dipertimbangkan dan masih banyak lagi pentingnya demokrasi ini.

Dengan ini diharapkan kita sebagai warga negara yang mencintai tanah air, dapat mengetahui pentingnya demokrasi untuk suatu negara dan dapat menegakkan demokrasi tersebut dengan benar dan wajar. Namun berdasarkan pada perolehan data yang pada intinya menyatakan bahwa pemahaman siswa SMA swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi sangatlah rendah, dalam hal ini tingkat rendahnya pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi bisa disebabkan karena dengan tidak dimasukkannya mata pelajaran PPKN khususnya dalam hal demokrasi pada pelaksanaan ujian nasional, maka minat atau kesadaran siswa untuk belajar mata pelajaran PPKN sangatlah rendah, dan kebanyakan mata pelajaran PPKN sering kali terkesampingkan oleh siswa dibandingkan dengan mata



pelajaran yang dimasukkan dalam ujian nasional. Mengingat sangatlah penting nilai-nilai demokrasi bagi bangsa dan negara, sangatlah disayangkan apabila berdasarkan pada penelitian ini terdapatlah data yang menyatakan bahwa pemahaman siswa sma swasta dan madrasah aliyah negeri kota Surabaya tentang demokrasi sangat rendah karena masih jauh dari 50% yakni terbilang hanya 4,5% saja.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

Pemahaman siswa SMA Swasta dan Madrasah Aliyah Negeri kota Surabaya tentang demokrasi tingkat pemahamannya sangatlah rendah karena masih sangat jauh dari 50% yakni terbilang 4,5% saja.

### Saran

Berdasarkan atas berbagai temuan yang diperoleh, maka sebagai saran dan masukan adalah sebagai berikut: Dengan diperolehnya data diatas dalam hal pemahaman siswa SMA sekota Surabaya tentang demokrasi yang masih dibidang sangatlah rendah dengan perolehan data jauh dibawah dari 50% yakni hanya terbilang 4,5% saja maka perlulah dilakukan pendidikan tentang demokrasi yang lebih signifikan pada siswa SMA khususnya pelajar SMA dikota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Dian Rakyat.

Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung : PT Refika Aditama .

Gaffa, Affan. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar Offset.

Rahman, Arifin. 2010. *Demokrasi dan Masyarakat Beradab*. Surabaya : Jurusan PMPKN FIS UNESA.

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan.1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo.

Tim Penyusun. 2006. *Panduan Penulisan dan Penilaian Skripsi Universitas Negeri Surabaya*.

{ [www.google referensi demokrasi](http://www.google.com/search?q=referensi+demokrasi&btnG=Google+Search), 2006 }

(<http://id.wikipedia.org/wiki/demokrasi>.)

(<http://lilystigfaiyah.blogspot.com/2012/09/prinsip-prinsip-demokrasi-menurut>

[para.html](#))

(<http://saepulmalik27.Blogspot.com/2011/10/nilai-nilai-dan-unsur-demokrasi.html>)

(<http://evahamzah18.blogspot.com/2011/01/syarat-syarat-pemerintah-demokrasi.html>)

(<http://www.ban-sm.or.id/provinsi/jawa-timur/akreditasi/index> )

(<http://belajarpkndenganhendri.wordpress.com/2011/04/6/demokrasi-sistem-politik/>)

(<http://www.scribd.com/doc/63872072/Asas-Asas-Pokok-Demokrasi>)

(<http://prezi.com/8kalueghlvpk/syarat-pemerintahan-demokrasi/> )

( <http://halil4.wordpress.com/2010/01/06/182/>)